

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atoshoki, Antonius. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Harahap, Yahyah. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Indrati, Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mertukisumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

B. Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Abustan. "Dimensi Pentingnya Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 70–76.
- Adam, Haidar. "Dissenting Opinion Dan Conturring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 304–324.

Ayun, Afiyah Qurrota, Asep Syarifuddin Hidayat, and Fitriyani Zein. "Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura Dan Prada." *Journal of Legal Research* 1, no. 1 (2019): 168–188.

Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1–14.

Chofifi, Ning Ayunda, and Eny Kusdarini. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2024): 408–433.

Fernanda, M. Giovani. "Implikasi Disseting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 5 (2024): 98–117.

Firmansyah, Aidil. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–146.

Gaffar, Janedjri M. "Fungsi, Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2009.

Hamdi, Mirja Fauzul. "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 313–324.

Herman. "Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks)." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 38–53.

Khozanah, Siti. "Inkonsistensi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus : Perbedaan Amar Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006

Perihal Tidak Mengikatnya Frasa “Dapat’ Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Lusiana, Wyda. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Studi Al-qur’an dan Hukum* 9, no. 2 (2023): 1–194.

Muqsitha, Shafira. “Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 1–9.

Prajatama, Hangga. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 41–50.

Rafiuddin. “Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Makassar).” Universitas Hasanudin, 2013.

Rusdi, Muhamad. “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Pranatahukum* 2, no. 1 (2019): 89–107.

S, Depri Liber, and Onata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 20–24.

Sudiarta, Ida Bagus Putu, Erikson Sihotang, and I Nyoman Suandika. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 166–180.

Sulistyowati, S, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, and Hanifa Putri Manoppo. “Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–25.

Suryanata, Andi Redani, and Muhammad Zaki Mubarrak. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum.” *UNNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173–12183.

Triningsih, Anna. “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–153.

C. Majalah dan Buletin

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Hukum Online*. Last modified 2018. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3f01fb73000e1c75f3/hukum-progresif-dari-satjipto-rahardjo/>.

Musthafa, Ivan Naimada. “Kerangka Pemikiran Hukum Gustav Radbruch.” *Kompasiana*. Last modified 2023. <https://www.kompasiana.com/naimada/645a81b74addee0a83486ca3/kerangka-pemikiran-hukum-gustav-radbruch>.

“Pengertian Dissenting Opinion Dalam Putusan MKNo Title.” *Info Hukum*. Last modified 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-dissenting-opinion-dalam-putusan-mk/>.

“Yurisprudensi.” *Pengadilan Agama Bekasi*. Last modified 2019. Accessed January 6, 2025. <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/92-tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/86-yurisprudensi>.

D. Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Tentang Bentuk Negara dan Kedaulatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

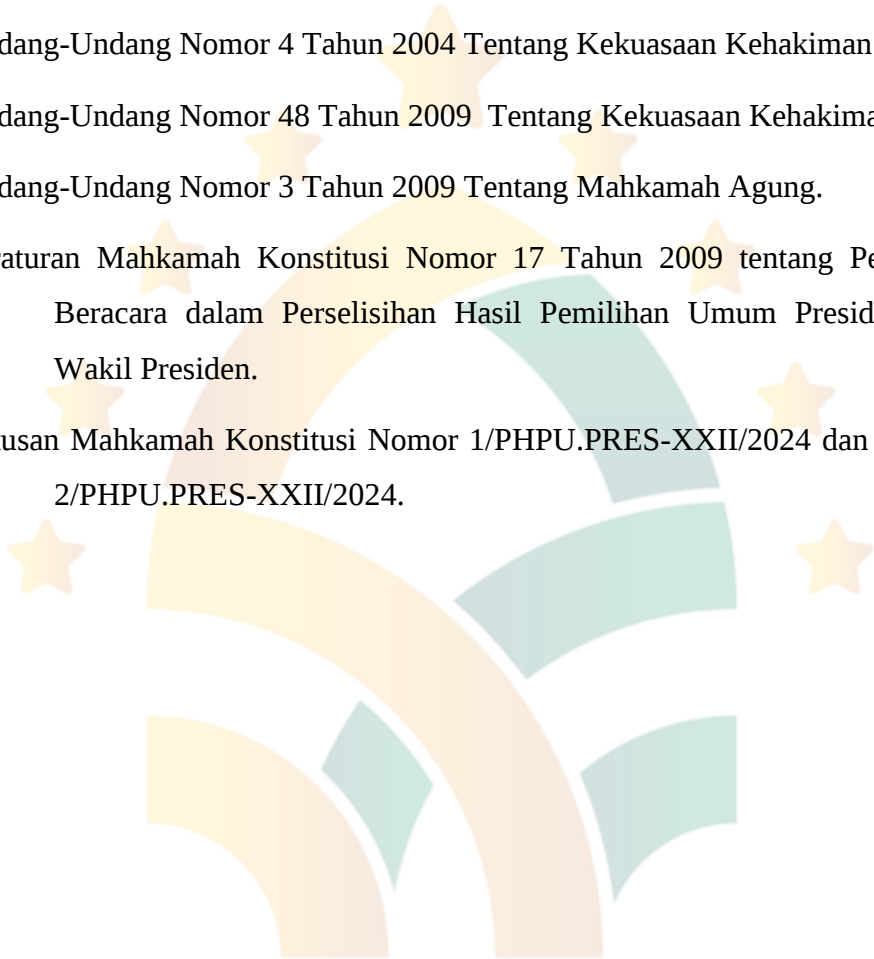
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON